

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di Pemerintah Pusat, Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, Departemen-Departemen, Badan Layanan Umum, Pemerintah Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Lembaga Sosial Masyarakat dan Yayasan Sosial, maupun proyek-proyek kerjasama organisasi sektor publik dan swasta (Santoso, 2007).

Akuntansi sektor publik dapat juga didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang memiliki tujuan (*purposive activity*) untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Haryanto, 2007). Dari berbagai pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik adalah sebuah proses untuk mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, serta membuat laporan keuangan pada organisasi sektor publik untuk memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan. Dengan adanya akuntansi sektor publik maka mempermudah dalam pengambilan keputusan.

Menurut Pinatik dan Pangkey (2015) akuntansi sektor publik di Indonesia ada beberapa bidang diantaranya adalah:

1. Akuntansi Pemerintah Pusat
2. Akuntansi Pemerintah Daerah
3. Akuntansi Desa
4. Akuntansi Tempat Ibadah: Masjid, Pura, Gereja, Wihara
5. Akuntansi LSM (Lembaga Sosial Masyarakat)
6. Akuntansi Yayasan
7. Akuntansi Pendidikan: Sekolah, Perguruan Tinggi
8. Akuntansi Kesehatan: Puskesmas, Rumah Sakit.

### **2.1.2 Akuntansi Pendidikan**

Dalam organisasi pendidikan, akuntansi digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan yang terkait dengan dana pendidikan. Pengertian akuntansi dapat dirumuskan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang jasa akuntansi dan dari proses kegiatannya.

Ditinjau dari sudut pandang pemakainya, akuntansi merupakan suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi (organisasi institusi pendidikan). Informasi akuntansi di dunia pendidikan sangat penting karena dapat digunakan sebagai pengambil keputusan internal dan

eksternal organisasi pendidikan (Bastian, 2007). Apabila ditinjau dari sudut kegiatannya, akuntansi dapat di definisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi.

Secara umum untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dari lembaga atau organisasi pendidikan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pendidikan nasional maka diperlukan adanya akuntansi pendidikan. Karena dari sisi keuangan akuntansi pendidikan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh tentang segala kegiatan dan aktivitas serta operasional dari lembaga atau organisasi pendidikan. Apabila secara keuangan laporan keuangannya kurang sehat, jelas akan mempengaruhi seluruh kegiatan operasional organisasi/lembaga pendidikan tersebut (Bastian, 2007).

#### **2.1.2.1 Peran dan Fungsi Akuntansi dalam Dunia Pendidikan**

Menurut (Bastian, 2007) peran dan fungsi akuntansi dalam dunia pendidikan adalah menyediakan informasi keuangan yang kuantitatif agar berguna dalam pengambilan keputusan.

Akuntansi di lingkungan sekolah bermanfaat untuk berbagai jabatan, adapun peran dan fungsi akuntansi dari masing-masing tingkat jabatan adalah sebagai berikut:

#### 1. Kepala Sekolah

Kepala sekolah menggunakan akuntansi untuk mengevaluasi sekolah, melakukan tindakan-tindakan pengoreksian dan melakukan perencanaan sekolah yang diperlukan untuk kemajuan sekolah (Bastian, 2007).

#### 2. Guru dan Karyawan

Guru dan karyawan tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas sekolah termasuk kemampuan sekolah dalam memberikan balas jasa dan kesempatan kerja.

#### 3. Kreditor/Pemberi Pinjaman

Untuk melihat kemampuan sekolah dalam membayar pinjaman.

#### 4. Orangtua Siswa

Orangtua siswa berkepentingan untuk mengetahui informasi kelangsungan hidup institusi pendidikan, terutama perjanjian jangka panjang dan tingkat ketergantungan sekolah (Bastian, 2007).

#### 5. Supplier/Pemasok

Tertarik tentang kemampuan sekolah dalam membayar utang pada saat jatuh tempo.

## 6. Pemerintah

Pemerintah dan lembaga dibawahnya berkepentingan terkait aktivitas sekolah dengan alokasi sumber daya. Seperti: mengatur aktivitas sekolah, menetapkan kebijakan anggaran, dan sebagai acuan penyusunan anggaran untuk tahun-tahun berikutnya.

## 7. Masyarakat

Masyarakat berkepentingan untuk melihat perkembangan laporan keuangan beserta rangkaian aktivitasnya.

### **2.1.2.2 Siklus Akuntansi Pendidikan.**

Siklus akuntansi pendidikan merupakan sistematisasi pencatatan transaksi keuangan, peringkasan dan pelaporan keuangan.

Menurut Bastian (2007) siklus akuntansi pendidikan dapat dikelompokkan menjadi 3 tahap, yaitu:

#### 1. Tahap Pencatatan

- a. Mengidentifikasi dan mengukur bukti transaksi serta bukti pencatatan.
- b. Mengelola dan mencatat bukti transaksi seperti kwitansi, cek, bilyet giro, nota kontan, faktur, nota debit/nota kredit, dan memo kedalam jurnal

- c. Dari jurnal kemudian di posting sesuai kelompok ke dalam akun buku besar

## 2. Tahap Pengikhtisaran

- a. Pembuatan neraca saldo
- b. Penyusunan jurnal penyesuaian
- c. Penyusunan neraca lajur
- d. Pembuatan jurnal penutup
- e. Penyusunan neraca saldo setelah penutupan
- f. Pembuatan jurnal pembalik

## 3. Tahap Pelaporan

- a. laporan surplus defisit
- b. laporan arus kas
- c. neraca
- d. catatan atas laporan keuangan

### **2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)**

Menurut (Bastian, 2007) dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan. Secara umum dana pendidikan disekolah dapat berasal dari tiga sumber yakni:

### 1. Pemerintah

Dana yang berasal dari pemerintah adalah dana penyelenggaraan pendidikan (DPP), bantuan APBD, dana kontinjensi, dan hibah luar negeri.

### 2. Orang tua

Dana yang berasal dari orangtua adalah Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan segala pungutan dari orangtua siswa.

### 3. Masyarakat

Dana yang berasal dari masyarakat diantaranya sumbangan dari alumni, masyarakat sekitar, perusahaan dan sebagainya.

Dwiharja dan Kurrohman (2013) menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) adalah dokumen yang harus dibuat oleh penyelenggara sekolah yaitu kepala sekolah, komite dan tim diawal tahun pelajaran. APBS memuat serangkaian kalkulasi kebutuhan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan berdasarkan rencana atau program yang telah disusun oleh penyelenggara sekolah. Selain itu APBS juga menggambarkan alokasi dan distribusi sumber-sumber keuangan kepada setiap bagian aktifitas sekolah.

Menurut Jack (2015) APBS merupakan salah satu sistem yang dapat dipergunakan sebagai alat perencanaan, pengorganisasian

dan pengawasan dari seluruh aktivitas organisasi atau pengelola pendidikan. Dengan menggunakan APBS, pengelola mampu menyusun perencanaan anggaran dengan lebih baik sehingga koordinasi dan pengawasan yang dilakukan dapat memadai pula.

Menurut Bastian (2007) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS), yang biasanya masuk dalam pos pendapatan adalah:

1. Sumbangan pendidikan yang terkucur secara triwulan (DPP)
2. Bantuan APBD
3. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP)
4. Uang gedung /uang pangkal
5. Dana sukarela yang berasal dari orang tua siswa

Sedangkan yang masuk dalam pos pengeluaran sekolah adalah sebagai berikut:

1. Gaji pegawai tetap
2. Honor
3. Operasional Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) selama satu tahun, biasanya terdiri atas: Alat Tulis Menulis, biaya transportasi olimpiade, dan rapat manajemen.
4. Pemeliharaan/Renovasi ringan seperti pengecatan, perbaikan atap yang bocor

5. Pembangunan Fisik/Investasi, umumnya terdiri dari pembangunan fasilitas/gedung baru, rehabilitasi berat, pembelian investasi/asset yang berumur lebih dari satu tahun : computer, alat peraga.

Dana yang tidak dimasukkan dalam APBS adalah dana kontijensi, dana hibah dari luar negeri, sumbangan dari masyarakat dan bantuan alumni, karena dana tersebut belum diperhitungkan ketika RAPBS diajukan pada awal tahun pelajaran. Tetapi dana – dana tersebut bisa muncul dan tidak menuntut kemungkinan masuk kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (Bastian, 2007).

#### **2.1.3.1 Langkah – Langkah Penyusunan RAPBS**

Menurut Karyatun (2016) langkah-langkah dalam penyusunan RAPBS diantaranya sebagai berikut :

- 1) Menentukan/menyusun sumber dana sekolah
- 2) Menyusun Rencana Kerja Tahunan Sekolah (RKTS) sesuai standar pendidikan
- 3) Menentukan kegiatan dalam RKTS yang dibiayai
- 4) Menyusun RAPBS

Setelah rencana tersebut dibahas oleh tim komite sekolah, maka dana yang sudah dianggarkan ditetapkan sebagai anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS), kemudian dari Dinas Pendidikan melakukan pemeriksaan dan meminta penjelasan atas program disertai dengan asal sumber dana.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam Proses Penyusunan RAPBS meliputi:

1. Menggunakan tujuan jangka pendek dan tujuan jangka menengah yang telah ditentukan dalam rencana pengembangan sekolah.
2. Mengumpulkan, merangkum, mengklasifikasi dan mengelompokkan masalah dari berbagai bidang.
3. Menganalisis kebutuhan sekolah selama satu tahun
4. Memprioritaskan kebutuhan yang penting.
5. Mengonsultasikan rencana yang dipaparkan dalam rencana pengembangan sekolah.
6. Mencatat dan mempertimbangkan seluruh sumber pemasukan
7. Menjelaskan rincian waktu, biaya, dan pelaporan, serta orang yang bertanggungjawab untuk mengawasi dan memantau kegiatan dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan hingga dilakukan evaluasi (Karyatun, 2016).

#### **2.1.3.2 Prinsip-Prinsip Penyusunan RAPBS**

Prinsip Penyusunan RAPBS adalah sebagai berikut:

1. RAPBS harus dititikberatkan pada peningkatan pembelajaran murid secara jujur, transparan, dan bertanggungjawab.

2. Penulisan RAPBS harus menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan di ekspos di tempat terbuka yang ada sekolah.
3. Sebaiknya dalam pembelanjaan dana lebih diutamakan pada program yang sejalan dengan pengembangan sekolah (Karyatun, 2016).

#### 2.1.4 Akuntabilitas

Sebagai organisasi publik, sekolah juga harus memiliki akuntabilitas. Saleh (2017) mengatakan bahwa akuntabilitas berkenaan dengan pertanggungjawaban untuk memberikan informasi atas segala aktivitas dan kinerja dari pihak wali amanah kepada pemberi amanah. Menurut Wicaksono (2015) akuntabilitas merupakan pemberian jawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi sektor publik.

Mardiasmo (2009) mengartikan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Pihak pemberi amanah (*principal*) memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. Keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan.

2. Keputusan yang dibuat harus memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku sesuai prinsip administrasi.
3. Ketepatan pemberian informasi.
4. Penjelasan dan pengomunikasian kebijakan.
5. Kelayakan dan kesesuaian
6. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan.

Akuntabilitas selain menyangkut proses, kinerja dan manajemen juga menyangkut pengelolaan keuangan dan kualitas output yang dapat diukur dari semakin kecilnya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan sekolah.

Menurut Boy dan Siringoringo (2009) Akuntabilitas dalam pengelolaan APBS adalah kemauan pihak sekolah (pimpinan dan bendahara) dalam memberikan penjelasan dan justifikasi penerimaan dan penggunaan anggaran. Penggunaan uang sekolah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan merupakan bentuk akuntabilitas. Berdasarkan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggungjawab (Duta dan Riharjo, 2013).

Dengan demikian akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mempertanggungjawabkan setiap program/kebijakan baik secara proses atau hasilnya. Di sisi lain untuk menciptakan akuntabilitas dan

pengawasan anggaran diperlukan partisipasi pimpinan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan.

#### **2.1.4.1 Dimensi Akuntabilitas**

Mardiasmo (2009) menjelaskan empat dimensi akuntabilitas yang harus ada di organisasi sektor publik, yaitu:

a. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas ini berhubungan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum yaitu jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lainnya yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik.

b. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah system informasi akuntansi, system informasi manajemen, dan prosedur administratif sudah cukup baik dalam hal akuntabilitas program.

c. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak. Setelah itu baru mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.

#### d. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan berhubungan dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

#### 2.1.4.2 Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai – nilai atau norma – norma eksternal yang dimiliki oleh *stakeholders* yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut (Krina, 2003).

Dilingkungan instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2002) ada 5 prinsip akuntabilitas yaitu:

- 1) Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi secara akuntabel.
- 2) Penggunaan sumber daya secara konsisten sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- 3) Mampu menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
- 4) Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang didapat.

- 5) Objektif, jujur, inovatif dan transparan sebagai katalisator perubahan manajemen dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja.

#### **2.1.4.3 Tujuan Akuntabilitas**

Tujuan akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sekolah (Fahrurrozi, 2012).

Indikator akuntabilitas meliputi:

1. Visi dan misi mengenai pendanaan sekolah dalam program kedepan sangat penting dan harus jelas.
2. APBS telah disusun sesuai dengan visi dan misi sekolah
3. Mengetahui prosedur dalam perancangan APBS dan penggunaan anggarannya
4. Perancangan APBS telah dilakukan dengan prosedur sebagaimana mestinya
5. Jika program dalam APBS yang direncanakan tidak tercapai, dibahas dalam rapatkomite sekolah (Laksmi M, 2017)

#### **2.1.5 Transparansi**

Prinsip transparansi pengelolaan pendidikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan merupakan prinsip yang dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh pemerintah, pemerintah

daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan.

Windarti (2015) mengemukakan bahwa transparansi merupakan tuntutan bagi setiap lembaga agar nilai lembaga juga meningkat. Transparansi adalah tersedianya informasi yang mudah dipahami, jelas dan benar baik informasi keuangan, program, maupun kinerja bagi pihak yang berkepentingan (Utama dan Setyani, 2014). Di lembaga pendidikan, keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan sumber keuangan, jumlah, rincian penggunaan dana, dan pertanggungjawabannya harus jelas.

Menurut Krina (2003) transparansi adalah kebebasan bagi semua orang untuk mendapatkan akses atau informasi mengenai penyelenggaraan pendidikan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang ingin dicapai. Dengan begitu dapat diambil kesimpulan bahwa transparansi adalah kebebasan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan informasi publik. Transparansi diperlukan guna menciptakan kepercayaan antar pemangku kepentingan melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam mengakses informasi yang akurat, dapat dipahami dan relevan. Menurut (Utama dan Setyani, 2014) prinsip - prinsip transparansi informasi disekolah meliputi:

- a. Mudah diakses oleh pihak – pihak yang memerlukan
- b. Mudah dipahami, dimengerti dan jelas

c. Benar, tidak terdapat kekeliruan

Transparansi apabila ditinjau dari institusi pendidikan, dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana setiap orang yang terkait dengan pendidikan (*stakeholder*), mengetahui dan terlibat aktif dalam pengelolaan sumber daya dan pengambilan kebijakan sekolah (Raeni, 2014).

Berikut adalah prinsip-prinsip transparansi menurut Saleh (2017) adalah:

- 1) Mudah dipahami oleh masyarakat
- 2) Dapat diterima oleh masyarakat
- 3) Dikelola secara terbuka dan dipertanggungjawabkan

Beberapa tujuan transparansi dalam sekolah antara lain:

1. Untuk menciptakan kepercayaan dan keyakinan bahwa sekolah merupakan organisasi pelayanan pendidikan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Untuk menciptakan kepercayaan antara sekolah dengan masyarakat melalui kemudahan dalam memberikan informasi yang memadai dan akurat.
3. Untuk menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good governance*).

Transparansi sekolah ditunjukkan oleh indikator sebagai berikut:

1. Mekanisme penyampaian aspirasi dan pengaduan orangtua murid mengenai pendanaan sekolah harus jelas dan terakomodasi
2. Terdapat sistem pemberian informasi mengenai anggaran bagi masyarakat untuk mengakses informasi pendanaan sekolah
3. Salinan laporan keuangan pengelolaan anggaran diinformasikan terhadap komite sekolah secara periodic
4. Sekolah secara informatif mensosialisasikan kebijakan anggaran yang ditetapkan (Laksmi M, 2013).

#### **2.1.6 Efisiensi**

Menurut Afonso Schuknecht dan Tanzi (2003) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja sektor publik didefinisikan sebagai hasil dari kegiatan sektor publik dan efisiensi didefinisikan sebagai hasilnya relatif terhadap sumber daya yang digunakan, namun masih sangat terbatas. Witurachmi (2016) menyatakan bahwa kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang sekecil- kecilnya dapat mencapai hasil yang sebesar – besarnya.

Menurut Duta dan Riharjo (2013) Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi pikiran, waktu, biaya, tenaga. Perbandingan itu meliputi :

1. Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya.

Kegiatan dapat dikatakan efisien apabila penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat memperoleh hasil yang ditetapkan.

2. Dilihat dari segi hasil.

Kegiatan dapat dikatakan efisien apabila dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya.

Ada tiga indikator efisiensi berdasarkan penelitian Raeni (2014) yaitu:

1. Pengelolaan Keuangan sekolah telah terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan.
2. Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan pendidikan pada setiap unit kerja.
3. Hemat, tidak mewah dan sesuai dengan kebutuhan.

#### **2.1.7 Komite Sekolah**

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 56 ayat 3 bahwa komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Selanjutnya menurut (Laminsar, 2014) partisipasi komite sekolah

adalah keterlibatan komite dalam pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat sebagai bentuk perwujudan perilaku yang positif dalam suatu rangkaian kerjasama.

Keberadaan komite sekolah pada satuan pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu, kualitas, efisiensi, dan relevansi pengelolaan pendidikan dengan menjalin kerjasama dengan kepala sekolah (Hikmah, 2016). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi komite Sekolah adalah proses penyaluran aspirasi masyarakat yang bersifat dukungan material maupun non material dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan pelaksanaan, pengawasan serta pengevaluasian pendidikan di sekolah.

#### **2.1.7.1 Peran Komite Sekolah**

Peran komite sekolah dalam dunia pendidikan diantaranya adalah: Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. (2) Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. (3) Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan di satuan pendidikan. (4) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002).

Menurut Hani'ah (2016) komite sekolah melaksanakan perannya sebagai pemberi pertimbangan dalam hal:

- 1) Mengesahkan program sekolah dan RAPBS
- 2) Perekrutan tenaga pendidik
- 3) Sarana dan prasarana sekolah
- 4) Meningkatkan proses pembelajaran
- 5) Memberi masukan terkait pengelolaan pendidikan di sekolah
- 6) Penyusunan visi, misi, tujuan dan kebijakan sekolah
- 7) Pengadaan buku bagi siswa

Berkaitan dengan peran komite sekolah sebagai pendukung meliputi:

- 1) Menjalin hubungan baik dengan wali murid
- 2) Melaksanakan konsep subsidi silang antara yang mampu dengan yang kurang mampu dalam penarikan iuran kepada wali murid
- 3) Mengadakan pertemuan rutin dengan wali murid
- 4) Pemberian semangat motivasi kepada orang tua murid
- 5) Meningkatkan mutu
- 6) Mengawasi kondisi anggaran pendidikan di sekolah

Peran komite sekolah sebagai pengontrol yaitu:

- 1) Melakukan pengawasan terkait kualitas program yang ada di sekolah
- 2) Mengobservasi sumber daya yang dimiliki sekolah
- 3) Mengawasi hasil ujian
- 4) Mengawasi penjadwalan program kerja sekolah
- 5) Mengawasi penggunaan dana untuk program
- 6) Mengawasi *stakeholders* dan sekolah dalam berpartisipasi

Sedangkan peran komite sekolah sebagai mediator diantaranya:

- 1) Mengadakan sosialisasi program dan kebijakan yang ada di sekolah kepada masyarakat.
- 2) Membantu meningkatkan hubungan timbal balik antara sekolah dengan masyarakat
- 3) Menampung aspirasi, ide, tuntutan dan menganalisis berbagai kebutuhan pendidikan di sekolah
- 4) Mengadakan rapat rutin dengan guru dan kepala sekolah

Melalui keempat peran yang dimiliki komite sekolah diharapkan mampu mewadai berbagai aspirasi masyarakat dalam usaha peningkatan mutu pendidikan.

Adapun indikator partisipasi komite sekolah menurut Laksmi M (2013) adalah sebagai berikut:

1. Komite sekolah turut diundang dan terlibat dalam penyusunan arah dan kebijakan APBS

2. Komite sekolah turut serta mengawasi baik secara langsung maupun tidak langsung proses pencapaian target APBS
3. Komite sekolah dapat memberikan saran dan kritik untuk dijadikan pertimbangan untuk merevisi APBS
4. Komite sekolah dapat menjelaskan arah kebijakan APBS yang direncanakan
5. Komite sekolah mendapat informasi dari pihak sekolah dan terlibat dalam pengelolaan pembiayaan sekolah.

Tujuan Partisipasi Komite Sekolah adalah:

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan upaya masyarakat dalam rangka memunculkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Menciptakan suasana dan kondisi yang akuntabel, transparan dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu dalam pendidikan

(Mas, 2011).

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dapat mendukung penelitian ini diantaranya:

Penelitian Dwiharja dan Kurrohman (2013) mengambil objek di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) berpengaruh positif terhadap partisipasi komite sekolah Sekolah Dasar Negeri se Kecamatan Patrang. Hasil penelitian kedua bahwa transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) berpengaruh positif terhadap partisipasi komite sekolah Sekolah Dasar Negeri se Kecamatan Patrang. Hasil penelitian ketiga menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) lebih besar pengaruhnya terhadap partisipasi komite sekolah dibandingkan dengan sikap transparan.

Penelitian Solihat dan Sugiharto (2009) mengambil objek penelitian di SMA Negeri 107 Jakarta. Transparansi dan akuntabilitas sebagai variabel dependen, partisipasi orang tua murid sebagai variabel dependen. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa Transparansi dan Akuntabilitas, baik secara bersama-sama (simultan) maupun secara parsial, mempunyai pengaruh positif terhadap partisipasi orangtua murid di SMA Negeri 107 Jakarta.

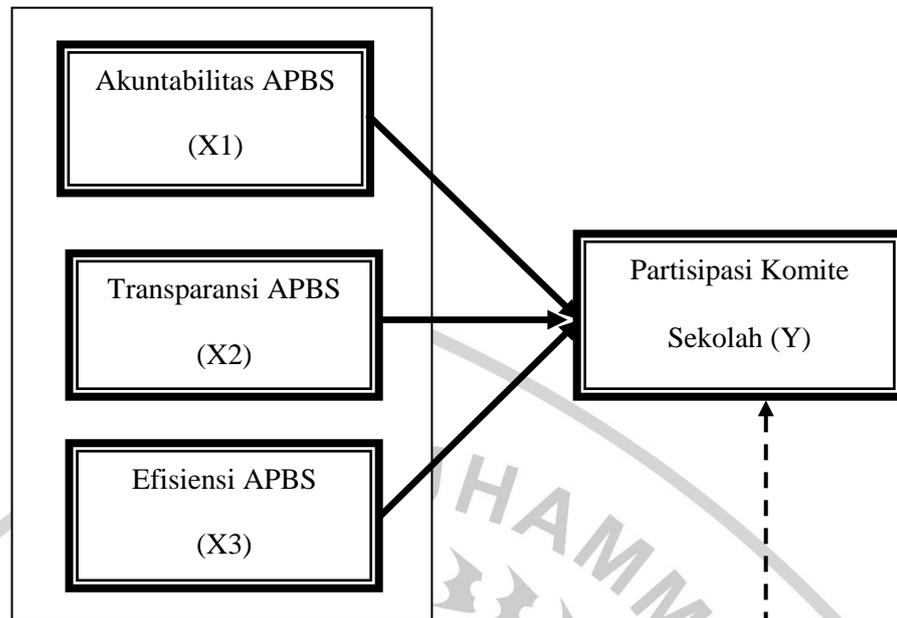
Penelitian Raeni (2014) mengambil objek penelitian pada Guru SMK Se-Kabupaten Kendal. Prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas sebagai variabel independen, sedangkan variabel dependennya

produktifitas SMK. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah secara simultan berpengaruh positif terhadap produktivitas SMK. Secara parsial hanya variabel transparansi yang tidak berpengaruh terhadap produktivitas SMK.

Penelitian Boy dan Siringoringo (2009) mengambil objek penelitian di SMA Negeri Kota Depok Jawa Barat. Akuntabilitas dan transparansi sebagai variabel independen sedangkan partisipasi orang tua murid sebagai variabel dependen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pada satuan pendidikan dalam Pengelolaan APBS baik secara bersama-sama maupun secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Penjelasan dari landasan teori yang telah dijelaskan sebelumnya di penelitian terdahulu, dapat memberikan gambaran kerangka pemikiran tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Variabel independen yang digunakan adalah akuntabilitas, transparansi dan efisiensi. Sedangkan variabel dependennya adalah partisipasi komite sekolah pada SLTA Se Derajat di Kabupaten Ponorogo. Untuk pengembangan hipotesis, kerangka pemikiran teoritis dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Kerangan:



= Pengaruh akuntabilitas terhadap partisipasi komite sekolah, pengaruh transparansi terhadap partisipasi komite sekolah, pengaruh efisiensi terhadap partisipasi komite sekolah



= Arah pengaruh akuntabilitas, transparansi dan efisiensi terhadap partisipasi komite sekolah.

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai kesimpulan sementara terhadap masalah yang diajukan dalam kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

## **1. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) Terhadap Partisipasi Komite Sekolah.**

Akuntabilitas sangat penting bagi lembaga atau organisasi yang dibiayai, atau mempunyai ketergantungan dengan publik (Solihat dan Sugiharto, 2009). Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban dana atau sumber daya pelaksanaan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan kepada pihak yang meminta keterangan karena pihak tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk turut mengetahui (Utama dan Setyani, 2014). Pihak yang meminta keterangan dalam hal ini adalah orangtua murid terkait dengan penerimaan dan penggunaan APBS.

Dana yang dikelola secara akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan komite sekolah dan orangtua murid disamping faktor-faktor lainnya seperti aturan perundang-undangan, kewajiban dan rasa tanggungjawab. Kemauan pihak sekolah dalam bentuk kemudahan akses informasi kepada komite sekolah selaku perwakilan orangtua murid mampu meningkatkan partisipasi komite sekolah untuk berkontribusi terhadap pembiayaan penyelenggaraan pendidikan sekolah (Hikmah,2016).

Dalam penelitiannya Boy dan Siringoringo (2009) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan. Penelitian ini diperkuat oleh Dwiharja dan Kurrohman (2013) bahwa akuntabilitas pengelolaan anggaran

pendapatan dan belanja sekolah (APBS) berpengaruh terhadap partisipasi Komite Sekolah.

Berdasarkan uraian tersebut dan penelitian terdahulu maka hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

**H<sub>01</sub> : Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) tidak berpengaruh terhadap partisipasi Komite Sekolah**

**H<sub>a1</sub> : Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) berpengaruh terhadap partisipasi Komite Sekolah.**

## **2. Pengaruh Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) Terhadap Partisipasi Komite Sekolah.**

Keterbukaan sekolah dalam pengelolaan keuangan merupakan satu hal yang tidak boleh diabaikan, karena tanpa adanya kejujuran dalam penyampaian informasi keuangan maka akan menimbulkan perbedaan persepsi kepada pihak yang berkepentingan. Transparansi keuangan sekolah adalah memberikan akses kepada *stakeholders* terkait pengelolaan keuangan sekolah (Raeni, 2014).

Komite sekolah sebagai wakil dari orang tua murid dan masyarakat mempunyai wewenang untuk meminta adanya transparansi di pihak sekolah terkait peran komite sekolah untuk senantiasa terlibat dalam fungsi pengawasan dan evaluasi pengelolaan finansial sekolah. Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Solihat dan Sugiharto (2009)

menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap partisipasi orang tua murid di SMA Negeri 107 Jakarta. Pendapat ini diperkuat oleh Dwiharja dan Kurrohman (2013) yang menyatakan bahwa transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) berpengaruh terhadap partisipasi komite sekolah Sekolah Dasar Negeri Se Kecamatan Patrang.

Berdasarkan uraian tersebut dan penelitian terdahulu maka hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

**H<sub>02</sub> : Transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) tidak berpengaruh terhadap partisipasi Komite Sekolah**

**H<sub>a2</sub> : Transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) berpengaruh terhadap partisipasi Komite Sekolah**

### **3. Pengaruh Efisiensi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) Terhadap Partisipasi Komite Sekolah.**

★ Penguoptimalan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan merupakan bentuk efisiensi dalam mengelola dana pendidikan (PP No.48 Tahun 2008). Efisiensi pembiayaan pendidikan ditentukan oleh ketepatan pendayagunaan anggaran pendidikan dengan cepat, hemat dan berdaya guna.

Dengan adanya dana yang efisien maka akan menimbulkan sinergitas atau hubungan timbal balik antara sekolah dengan orangtua murid untuk turut berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan dalam hal ini diwakili oleh komite sekolah. Penelitian yang dilakukan oleh Raeni (2014) menemukan bahwa efisiensi pengelolaan keuangan sekolah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap produktivitas SMK, dengan adanya efisiensi pembiayaan keuangan sekolah akan terarah dan terkendali sesuai rencana program.

Berdasarkan uraian tersebut dan penelitian terdahulu maka hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

**H<sub>03</sub> : Efisiensi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) tidak berpengaruh terhadap partisipasi Komite Sekolah**

**H<sub>a3</sub> : Efisiensi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) berpengaruh terhadap partisipasi Komite Sekolah**

**4. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah terhadap Partisipasi Komite Sekolah.**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2008 tentang prinsip yang melandasi pengelolaan dana pendidikan adalah prinsip keadilan, prinsip efisiensi, prinsip transparansi dan prinsip

akuntabilitas. Dimana peran komite sekolah dalam mengawal anggaran pendapatan dan belanja sekolah sangatlah penting sebagai representasi orangtua/wali murid dan stakeholder pendidikan dengan semakin tinggi akuntabilitas, transparansi dan efisiensi akan menimbulkan hubungan timbal balik antara sekolah dengan orangtua murid.

Dengan demikian hipotesis ke empat yang dapat dirumuskan adalahb sebagai berikut:

**H<sub>04</sub> :Akuntabilitas, transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) tidak berpengaruh terhadap partisipasi komite sekolah.**

**H<sub>a4</sub> :Akuntabilitas, transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran pendapataan dan belanja sekolah (APBS) berpengaruh terhadap partisipasi komie sekolah.**

